

# Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik

M. Ali Jaya Saragih<sup>1</sup>, Eka Nurmala Sari<sup>2</sup>, Irfan<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 5 Mei 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

### Keywords:

Transparansi,  
Akuntabilitas,  
Partisipasi Anggaran,  
Pengelolaan Keuangan Desa  
Good Governance

### Correspondence:

Eka Nurmala Sari

[ekanurmalasari@umsu.ac.id](mailto:ekanurmalasari@umsu.ac.id)

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan yang digunakan adalah asosiatif kuantitatif dengan teknik sampel jenuh, di mana seluruh perangkat desa dari 27 desa dijadikan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0, yang memungkinkan evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai t-statistik dan p-value masing-masing variabel menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Indikator yang tidak memenuhi kriteria validitas telah dieliminasi untuk meningkatkan kekuatan konstruk. Secara teoritis, hasil ini menguatkan konsep *good governance* dan *agency theory*, di mana keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik menjadi elemen penting dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang efisien, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas.

This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and budget participation on village financial management in Dolok Masihul Sub-district, Serdang Bedagai Regency. An associative quantitative approach was employed, using a saturated sampling technique where all village officials from 27 villages were selected as respondents. Data were collected through a closed-ended questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using SmartPLS 3.0, allowing for simultaneous evaluation of the measurement model (outer model) and structural model (inner model). The results indicate that both transparency and accountability have a positive and significant effect on village financial management. The t-statistics and p-values support the acceptance of the research hypotheses. Indicators that did not meet the validity criteria were eliminated to improve construct strength. The findings theoretically reinforce the concepts of good governance and agency theory, which highlight the importance of information disclosure and public accountability in enhancing the efficiency, credibility, and transparency of public financial management. This study is expected to contribute to academic discourse and serve as a practical reference for village governments in strengthening financial management systems based on the principles of transparency, accountability, and community participation.

This is an open access article under the [CC BY NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



## Pendahuluan

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memerlukan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan desa adalah alokasi dana desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kualitas pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh sejauh mana asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat diterapkan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas telah terbukti menjadi elemen penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Sari et al., 2020; Almquist et al., 2013; Grossi & Steccolini, 2014).

Kecamatan Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai, yang memiliki 27 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di wilayah tersebut, menjadi locus yang strategis dalam meninjau bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan. Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh desa-desa di wilayah ini seharusnya menjadi pemicu percepatan pembangunan desa jika dikelola secara baik. Namun demikian, seringkali pengelolaan tersebut dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sistem akuntabilitas internal. Dalam berbagai studi, disebutkan bahwa ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran dapat memicu inefisiensi, penyimpangan, bahkan korupsi (Martins et al., 2019; Mikuła et al., 2022; Mahmood et al., 2021). Oleh karena itu, upaya untuk meninjau kembali bagaimana ketiga elemen tata kelola ini diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Dolok Masihul menjadi sangat relevan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian oleh Debi (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berbasis value for money. Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh Gerryan (2015) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Siregar (2011) justru menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Secara global, studi oleh Cuadrado-Ballesteros et al. (2017), Caperchione et al. (2021), dan Pina et al. (2019) mendukung bahwa kombinasi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di berbagai level pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan ADD, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama sebagaimana dinyatakan oleh Wiratna (2015). Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai ini seringkali masih bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi partisipasi dan akuntabilitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di tingkat desa. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks pengujian simultan dari ketiga variabel tata kelola keuangan desa di wilayah yang memiliki dinamika sosial dan administratif yang khas seperti Dolok Masihul. Selain itu, pendekatan empiris yang digunakan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pengelolaan keuangan desa di Indonesia yang masih terbatas, khususnya dalam kerangka teoritis good governance dan value for money (van Helden & Reichard, 2019; Ferry et al., 2021; Bracci et al., 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran berperan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas tata kelola dana desa, serta menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perbaikan sistem pengelolaan dana desa. Secara akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengayaan literatur mengenai tata kelola keuangan publik berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks negara berkembang.

## Uraian Teori

Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks desentralisasi fiskal, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh seberapa besar desa mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran (Khan et al., 2020; Azfar et al., 2001; Alonazi, 2021). Ketiga variabel ini bukan hanya menjadi indikator tata kelola yang efektif, namun juga fondasi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan efisiensi penggunaan dana desa.

### Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara mudah oleh publik, sehingga mendorong pengawasan partisipatif dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran (Piotrowski & Van Ryzin, 2007; Hood & Heald, 2006).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat transparansi yang tinggi secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran publik (Bauhr & Grimes, 2014; de Simone et

al., 2020). Dalam konteks desa, transparansi berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat lokal (Halim & Adnan, 2021; Mahmudi, 2022). Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi anggaran desa akan lebih terdorong untuk terlibat dalam pengawasan dan perumusan kebijakan. Hal ini menciptakan iklim tata kelola keuangan desa yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik (Gaventa & McGee, 2013). Oleh karena itu, transparansi diyakini memiliki hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

### **Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, baik secara administratif maupun publik (Mulgan, 2000). Akuntabilitas mendorong desa untuk lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa (Brinkerhoff, 2003).

Dalam studi empiris, ditemukan bahwa akuntabilitas publik yang kuat berkontribusi langsung terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan (Siddiquee, 2014). Akuntabilitas juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi (Fox, 2007; Bovens, 2007). Di level desa, praktik akuntabilitas yang baik dapat menciptakan kejelasan tanggung jawab antar perangkat desa dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan (Nasution et al., 2021). Ini penting karena keuangan desa kerap menjadi objek rawan penyimpangan apabila tidak diiringi dengan sistem akuntabilitas yang memadai. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

### **Partisipasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik**

Partisipasi anggaran merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran desa (Fung, 2006). Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang kebijakan dan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata warga (Irvin & Stansbury, 2004). Penelitian oleh Wampler (2007) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa, kualitas pengambilan keputusan anggaran meningkat karena didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan beragam (Sintomer et al., 2008).

Partisipasi juga mendorong rasa memiliki atas program pembangunan desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan dan keberhasilan implementasi program. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam anggaran desa diyakini berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih baik (Ganuza & Baiocchi, 2012). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan

H3: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

### **Hubungan Simultan antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Ketiga variabel utama dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memiliki hubungan yang sinergis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Transparansi mendukung akuntabilitas melalui keterbukaan informasi yang memungkinkan pengawasan publik. Akuntabilitas memperkuat transparansi dengan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah desa dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka. Sementara itu, partisipasi memperluas ruang keterlibatan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa (OECD, 2021; UNDP, 2022; World Bank, 2023).

Ketiganya saling berkontribusi terhadap implementasi good governance di tingkat lokal, yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam perspektif sistem, hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan diprediksi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan

H4: Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengkaji hubungan antara variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan teori yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena hubungan antar variabel. Seluruh perangkat desa dari 27 desa dijadikan sebagai sampel menggunakan teknik sampel jenuh, karena jumlah populasi relatif kecil dan memungkinkan untuk dijadikan responden secara keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan konsisten. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengolahan hasil kuesioner, uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, hingga pengujian model struktural (inner model). Penggunaan SmartPLS memungkinkan analisis model pengukuran (outer model) dan model struktural secara simultan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel. Dengan analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik dan berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

## Hasil Dan Pembahasan

### Analisis data

#### Convergent Validity

*Convergent validity* merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 - 0,70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 - 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity*, pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### Convergent Validity Pada Transparansi

Indikator konstruk pada variable transparansi berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Convergent Validity Transparansi**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X1.1	0,794	0,50	Memenuhi
X1.2	0,796	0,50	Memenuhi
X1.3	0,712	0,50	Memenuhi
X1.4	0,631	0,50	Memenuhi
X1.5	0,774	0,50	Memenuhi
X1.6	0,495	0,50	Tidak Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

#### Convergent Validity Pada Akuntabilitas

Indikator konstruk pada variable akuntabilitas berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Convergent Validity Akuntabilitas**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X2.1	0,512	0,50	Memenuhi
X2.2	0,655	0,50	Memenuhi
X2.3	0,654	0,50	Memenuhi
X2.4	0,581	0,50	Memenuhi
X2.5	0,586	0,50	Memenuhi
X2.6	0,781	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

### Convergent Validity Pada Partisipasi

Indikator konstruk pada variable partisipasi berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Convergent Validity Partisipasi**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X3.1	0,599	0,50	Memenuhi
X3.2	0,727	0,50	Memenuhi
X3.3	0,511	0,50	Memenuhi
X3.4	0,842	0,50	Memenuhi
X3.5	0,841	0,50	Memenuhi
X3.6	0,570	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

### Convergent Validity Pada Pengelolaan Dana Desa (PDD)

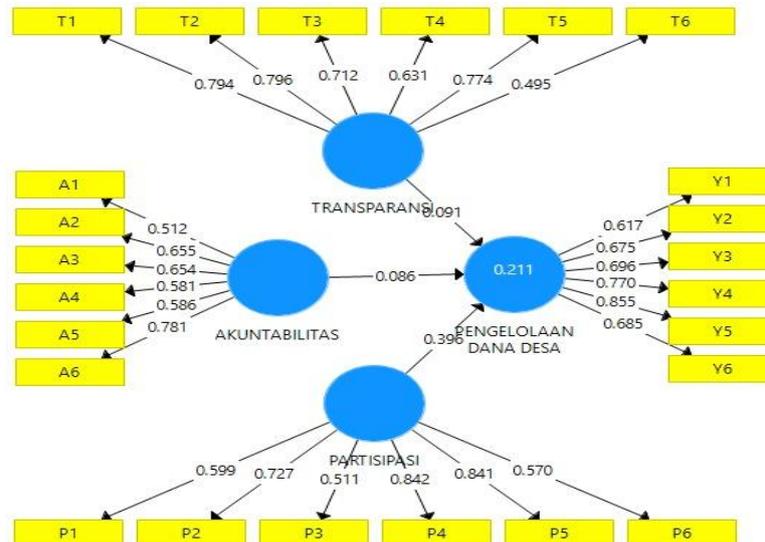
Indikator konstruk pada variable pengelolaan dana desa berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Convergent Validity Pengelolaan Keuangan Desa**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y1	0,617	0,50	Memenuhi
Y2	0,675	0,50	Memenuhi
Y3	0,696	0,50	Memenuhi
Y4	0,770	0,50	Memenuhi
Y5	0,855	0,50	Memenuhi
Y6	0,685	0,50	Memenuhi

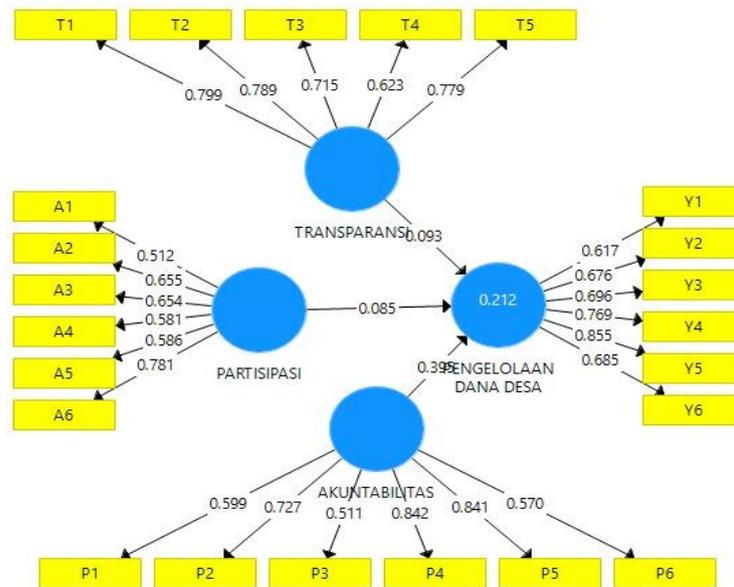
Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari *convergent validity* melalui *loading factor* dapat juga dikemukakan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. First Outer Loading**

Berdasarkan table *convergent validity* indikator konstruk pada masing masing variable, maka dapat dikemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel transparansi yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X1.6. Variabel akuntabilitas memenuhi nilai *loading factor*. Variabel partisipasi memenuhi nilai *loading factor*. Variable pengelolaan dana desa dimana seluruh indikator konstruk memenuhi nilai *loading factor*. Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk di buang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor di buang dapat dikemukakan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Scord Outer Loading**

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Convergent Validity Pada Transparansi**

Indikator konstruk pada variable transparansi setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 5 (lima) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Convergent Validity Transparansi**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X1.1	0,787	0,50	Memenuhi
X1.2	0,796	0,50	Memenuhi
X1.3	0,707	0,50	Memenuhi
X1.4	0,640	0,50	Memenuhi
X1.5	0,768	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

**Convergent Validity Pada Akuntabilitas (A)**

Indikator konstruk pada variable akuntabilitas setelah indikator konstruk pada variabel transparansi yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka nilai loading faktor pada variabel akuntabilitas turun berubah. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini

**Tabel 6. Convergent Validity Akuntabilitas**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X2.1	0,597	0,50	Memenuhi
X2.2	0,583	0,50	Memenuhi
X2.3	0,504	0,50	Memenuhi
X2.4	0,578	0,50	Memenuhi
X2.5	0,526	0,50	Memenuhi
X2.6	0,769	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

**Convergent Validity Pada Partisipasi (P)**

Indikator konstruk pada variable akuntabilitas setelah indikator konstruk pada variabel transparansi yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka nilai loading faktor pada variabel partisipasi turut berubah. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Convergent Validity Partisipasi**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X3.1	0,519	0,50	Memenuhi
X3.2	0,644	0,50	Memenuhi
X3.3	0,539	0,50	Memenuhi
X3.4	0,860	0,50	Memenuhi
X3.5	0,861	0,50	Memenuhi
X3.6	0,531	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

#### **Convergent Validity Pada Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)**

Indikator konstruk pada variabel pengelolaan dana desa indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Convergent Validity Pengelolaan Keuangan Desa**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y1	0,563	0,50	Memenuhi
Y2	0,538	0,50	Memenuhi
Y3	0,651	0,50	Memenuhi
Y4	0,770	0,50	Memenuhi
Y5	0,859	0,50	Memenuhi
Y6	0,615	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

#### **Discriminant Validity**

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). adapun parameter *cross loading* dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ( $> 0,50$ ) (Ghozali dan Latan, 2012: 75).

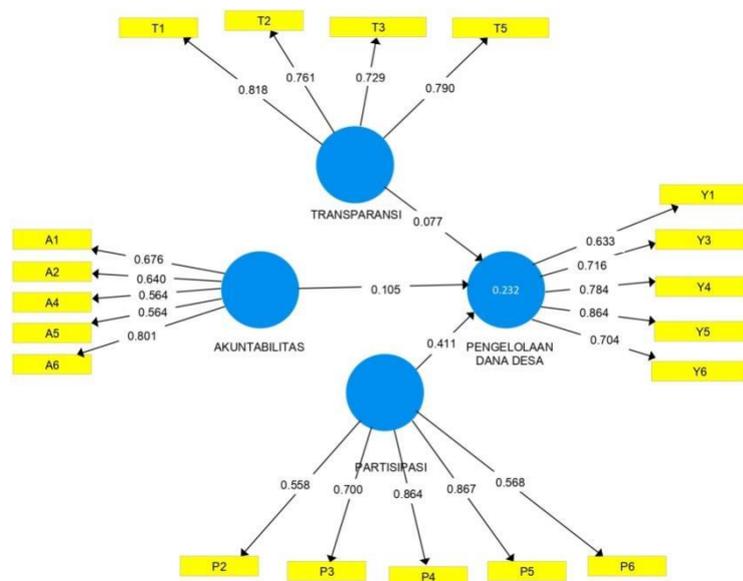
Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Table 9. First Analysis Discriminant Validity Pada Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Nilai
Transparansi	0,502
Akuntabilitas	0,402
Partisipasi	0,482
Pengelolaan dana desa	0,519

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0,

Tabel 9. memperlihatkan bahwa nilai *average variance extracted* pada variabel ada yang tidak memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini disebabkan nilai *average variance extracted* pada variabel tersebut  $< 0,50$ , maka untuk memenuhi persyaratan dalam *discriminant validity* dimana nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka indikator-indikator konstruk yang memiliki nilai *loading factor* paling rendah/kecil dikeluarkan dalam setiap variabel model pengukuran. Berdasarkan hasil analisis dimana nilai *loading factor* pada indikator konstruk paling rendah pada setiap variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan variabel pengelolaan dana desa. Hasil dari *outer loading* akhir dari model pengukuran dikemukakan pada gambar dan tabel di bawah ini:



Gambar 3 Third Outer Loading

Tabel 10. Outer Loading

	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	TRANSPARANSI
A1	0,676			
A2	0,640			
A4	0,564			
A5	0,564			
A6	0,801			
P2		0,558		
P3		0,700		
P4		0,864		
P5		0,867		
P6		0,568		
T1				0,818
T2				0,761
T3				0,729
T5				0,790
Y1			0,633	
Y3			0,716	
Y4			0,784	
Y5			0,864	
Y6			0,704	

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

Adapun hasil analisis *discriminant validity* pada nilai *average variance extracted* setelah masing-masing indikator konstruk yang paling rendah dikeluarkan (Lihat perbandingan Gambar 4.3. *Second Outer Loading* dengan Gambar 4.4. *Third Outer Loading*), maka terjadi kenaikan nilai AVE, hal ini dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Table 11. Secondary Analysis Discriminant Validity  
Pada Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Transparansi (T)	0,529
Akuntabilitas (A)	0,538
Partisipasi (P)	0,522
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,525

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021

Tabel 4.21 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variable memiliki nilai *average variance extracted* lebih besar dari 0,50. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji *disciminant validity*, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

### **Composite Reliability**

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan *composite reliability* dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Adapun dalam melakukan penilaian terhadap *composite reliability* melalui *rule of thumb*, dimana nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 (> 0,70). Pengujian reliabilitas pada setiap konstruk juga dapat dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*, ketentuan dari penilaian dilakukan melalui *rule of thumb*, dimana nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 (> 0,70). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut:

**Table 12. Composite Reliability**

Variabel	Nilai
Transparansi (T)	0,781
Akuntabilitas (A)	0,777
Partisipasi (P)	0,764
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,796

### **Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021**

Table 4.22 memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* pada variabel Transparansi (T), Akuntabilitas (A), Partisipasi (P) dan Pengelolaan Dana Desa (Y), masing-masing sebesar 0,781, 0,777, 0,764 dan 0,796. Seluruh nilai reliability construct > 0,70. Maka dalam hal ini keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

### **Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

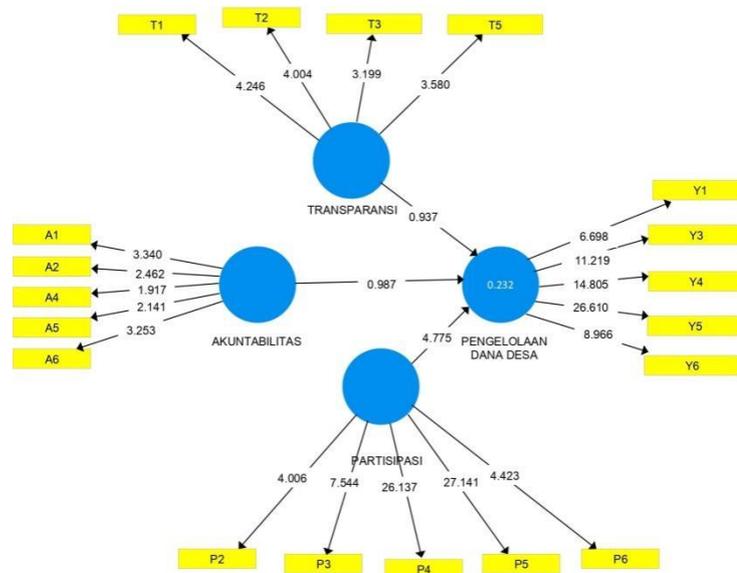
Pengujian pada model struktural (*inner model*) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai *R-Square*. Dimana nantinya dapat diketahui tingkat *variance* terhadap perubahan variable independent (perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi) terhadap variable dependent (penyerapan anggaran). Hasil analisis *R-Square* dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 13 R-Square**

	R-Square
Pengelolaan Dana Desa	0,232

### **Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021**

Tabel 13 memperlihatkan nilai *R-Square* pada variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,232. Maka dapat dijelaskan bahwa *variance* pada variabel transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi mampu menjelaskan variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,232. Berdasarkan pendapat Chin (Ghozali dan Latan, 2015) mengemukakan kriteria *R-Square* jika *Rule of Thumb* sebesar 0,67 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,33 model penelitian dalam kategori moderat, 0,19 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai *R-Square* sebesar 0,232. Maka model penelitian dalam kategori lemah. Dalam melakukan evaluasi model struktural (*inner model*) dapat dikemukakan melalui path diagram, menggunakan analisis pada *bootstrapping*. Maka diperoleh gambar di bawah ini:



Gambar 3. Output Bootstrapping

**Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis data pada Gambar 4.4 menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Table 14 Uji Hipotesis**

	Original Sample	T Statistic	P Values	Keputusan
T ⇒ Y	0,077	2,055	0,029	H0 Ditolak
A ⇒ Y	0,105	2,000	0,031	H0 Ditolak
P ⇒ Y	0,411	4,448	0,000	H0 Ditolak

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021.

Berdasarkan hasil analisis data yang dikemukakan di atas pada tabel 4.24. maka dapat dikemukakan interpretasi dari pengujian hipotesis pada penelitian ini:

**a. Pengujian Hipotesis Pada H<sub>1</sub>**

Hasil analisis uji *statistic* pada H<sub>1</sub>, diperoleh nilai t statistik sebesar 2,055 dengan p-value sebesar 0,029. Maka dapat dikemukakan bahwa t statistik > t table (2,055 > 1,976 ) atau 0,029 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kecamatan Dolok Masihul.

**b. Pengujian Hipotesis Pada H<sub>2</sub>**

Hasil analisis uji *statistik* pada H<sub>2</sub>, diperoleh nilai t statistik sebesar 2,00 dengan p-value sebesar 0,031. Maka dikemukakan bahwa t statistik > t table (2,00 > 1,976) atau 0,031 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabltilas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kecamatan Dolok Masihul.

**c. Pengujian Hipotesis Pada H<sub>3</sub>**

Hasil analisis uji *statistik* pada H<sub>3</sub>, diperoleh nilai t statistik sebesar 4,488 dengan p-value sebesar 0,000. Maka dapat dikemukakan bahwa t statistik > t table (4,488 > 1,976 atau 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul.

**d. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Dengan bantuan olahan analisis SEM-PLS diperoleh koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) terletak pada tabel *model Summary* dan tertulis *R Square*. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R Square/Adjusted R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.28. pada berikut ini :

**Tabel 15. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

	R Square	R Square Adjusted
<b>PENGELOLAAN DANA DESA</b>	0,232	0,215

**Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021**

Hasil olahan pada tabel 15 di atas terlihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sudah disesuaikan *R Square* sebesar 0,232. Artinya 23,2% variabel dependen (pengelolaan keuangan desa) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan sisanya sebesar 76,8% (100% - 23,2%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### **Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Dolok Masihul**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 2,055 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,976, serta nilai p-value sebesar 0,029 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) diterima, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Secara konseptual, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor krusial karena mencerminkan sejauh mana pemerintah desa membuka informasi terkait pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Transparansi mendorong terciptanya partisipasi publik dan pengawasan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan keuangan desa. Ketika informasi terkait pendapatan, belanja, serta program pembangunan desa disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik akan meningkat.

Dari sisi pengukuran variabel, indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas enam butir. Hasil *First Outer Loading* menunjukkan bahwa indikator dengan kontribusi paling tinggi adalah X1.2 dengan nilai loading sebesar 0,796. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut paling mewakili konstruk transparansi dalam konteks penelitian ini. Sebaliknya, indikator dengan kontribusi terendah adalah X1.6 dengan nilai loading sebesar 0,495, yang berada di bawah ambang batas minimum (0,5), sehingga dikeluarkan dari analisis lanjutan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan validitas konstruk variabel transparansi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa misalnya melalui publikasi informasi keuangan yang jelas dan tepat waktu semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan desa. Temuan ini selaras dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama dalam mendorong tata kelola keuangan publik yang baik.

### **Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Dolok Masihul**

Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan melalui nilai t-statistik sebesar 2,00 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,976, serta p-value sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, maka setiap penggunaan dana publik dapat diaudit, dinilai, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Secara empiris, variabel akuntabilitas diukur dengan enam indikator. Hasil *First Outer Loading* menunjukkan bahwa indikator X2.6 merupakan yang paling kuat, dengan nilai loading sebesar 0,781, sedangkan nilai terendah ditemukan pada X2.1 dengan nilai 0,512, namun masih memenuhi ambang batas validitas. Selanjutnya, pada *Second Outer Loading*, indikator X2.6 tetap menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,769, sedangkan indikator X2.3 memiliki nilai terendah yaitu 0,504. Setelah dilakukan *Discriminant Validity Analysis* melalui nilai *Average Variance Extracted (AVE)*, indikator X2.3 dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria validitas. Penghapusan indikator X2.3 berdampak positif terhadap validitas konstruk akuntabilitas. Awalnya, nilai AVE hanya sebesar 0,402, namun setelah indikator tersebut dikeluarkan, nilai AVE meningkat menjadi

0,538. Ini menunjukkan bahwa konstruk akuntabilitas menjadi lebih valid dalam menjelaskan variabel laten setelah indikator yang lemah dieliminasi.

Secara teoritis, hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan melalui pendekatan *agency theory*, di mana pemerintah desa (sebagai agen) memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat (sebagai prinsipal). Ketika akuntabilitas ditegakkan melalui pelaporan yang jelas, audit internal dan eksternal, serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi anggaran, maka tata kelola keuangan desa akan meningkat.

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul. Transparansi terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kualitas tata kelola keuangan desa, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 2,055 dan p-value 0,029. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi keuangan oleh pemerintah desa, maka semakin meningkat pula efektivitas pengelolaan dana publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pendapatan, belanja, dan program pembangunan desa, yang kemudian mendorong partisipasi aktif serta pengawasan sosial. Dalam konteks ini, indikator X1.2 menjadi representasi paling kuat dari konstruk transparansi, sedangkan indikator X1.6 yang memiliki nilai loading rendah telah dikeluarkan untuk meningkatkan validitas model.

Sementara itu, akuntabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai t-statistik 2,00 dan p-value 0,031. Pemerintah desa yang memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik cenderung menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini didukung oleh pelaporan keuangan yang jelas, audit berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi anggaran. Pengukuran konstruk akuntabilitas menunjukkan bahwa indikator X2.6 memberikan kontribusi tertinggi, sedangkan indikator X2.3 yang dinilai kurang valid telah dieliminasi, yang berdampak pada meningkatnya nilai Average Variance Extracted (AVE) menjadi 0,538.

Secara teoritis, temuan ini menguatkan konsep *good governance* dan *agency theory*, yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama dalam membangun tata kelola keuangan publik yang kredibel dan terpercaya. Pemerintah desa yang terbuka dan bertanggung jawab akan mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

## Referensi

- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 479–487. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>
- Alonazi, W. B. (2021). The role of good governance in strengthening fiscal decentralization outcomes. *Public Administration and Development*, 41(3), 163–174. <https://doi.org/10.1002/pad.1925>
- Azfar, O., Kahkonen, S., & Meagher, P. (2001). *Conditions for effective decentralized governance: A synthesis of research findings*. IRIS Center, University of Maryland.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or resignation: The implications of transparency for societal accountability. *Governance*, 27(2), 291–320. <https://doi.org/10.1111/gove.12033>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2019). Public sector accounting, accountability and austerity: More than balancing the books? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(1), 236–261. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2018-3520>
- Brinkerhoff, D. W. (2003). Accountability and health systems: Toward conceptual clarity and policy relevance. *Health Policy and Planning*, 18(6), 371–379. <https://doi.org/10.1093/heapol/czg045>
- Caperchione, E., Petersen, O. H., & Sarapuu, K. (2021). Good governance in public management: The relevance of performance measurement. *International Journal of Public Sector Management*, 34(5), 541–556. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2020-0012>
- Cuadrado-Ballesteros, B., García-Sánchez, I.-M., & Prado-Lorenzo, J.-M. (2017). Do democratic governments enhance citizens' engagement with public services through transparency? *Public Management Review*, 19(8), 1156–1180. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1257063>

- de Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourao, P. R. (2020). Transparency and accountability in public financial management: A literature review. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 1094–1120. <https://doi.org/10.1111/joes.12379>
- Diamond, L. (2007). Building trust in government by improving governance. In *Performance and legitimacy: Reflections on civil service reform in Africa* (pp. 256–280). World Bank.
- Ferry, L., Coombs, H., & Eckersley, P. (2021). Budgeting and accountability in the public sector: Towards a new public governance? *Public Money & Management*, 41(1), 58–66. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1806115>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Ganuza, E., & Baiocchi, G. (2012). The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe. *Journal of Public Deliberation*, 8(2), Article 8. <https://doi.org/10.16997/jdd.143>
- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. *Development Policy Review*, 31(S1), s3–s28. <https://doi.org/10.1111/dpr.12017>
- Grossi, G., & Steccolini, I. (2014). Pursuing private or public accountability in the public sector? Applying IPSASs to define the boundaries between state, market and society. *International Journal of Public Sector Management*, 27(4), 301–319. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2013-0106>
- Halim, A., & Adnan, M. A. (2021). Village financial governance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 133–148. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.04.12008>
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122>
- Hood, C., & Heald, D. (2006). *Transparency: The key to better governance?* Oxford University Press.
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Khan, M. A., Ahmad, F., & Anwar, Z. (2020). Fiscal decentralization, governance and public service delivery in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 40(2), 693–703.
- Kuppusamy, K. S., Zulkifli, N., & Ahmad, S. (2010). Accountability and transparency in managing public funds: How effective are public audits in Malaysia? *Asian Journal of Public Administration*, 32(2), 147–165. <https://doi.org/10.1080/02598272.2010.10800289>
- Linde, J., & Erlingsson, G. Ó. (2013). The eroding effect of corruption on system support in Sweden. *Governance*, 26(4), 585–603. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01602.x>
- Mahmood, M., Basharat, S., & Bashir, Z. (2021). Public sector transparency and accountability: Evidence from South Asia. *Journal of Asian Public Policy*, 14(2), 263–281. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1779673>
- Mahmudi, M. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa: Perspektif akuntansi sektor publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4), 15–28.
- Martins, P., Oliveira, A., & Costa, C. (2019). Transparency and accountability in the public sector: A comprehensive model. *Public Policy and Administration*, 34(3), 228–247. <https://doi.org/10.1177/0952076718782992>
- Mikuła, Ł., Kaczmarek, T., & Kociuba, D. (2022). Participatory budgeting as a form of public accountability: Evidence from Poland. *Cities*, 120, 103440. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103440>
- Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Nasution, H., Yusniar, Y., & Rahmat, M. (2021). The accountability of village fund management in strengthening village government capacity. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(5), 101–110. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2621>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0047>
- OECD. (2021). *Enhancing public accountability in decentralized governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264331468-en>
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizens' attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323. <https://doi.org/10.1177/0275074006296777>
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2019). Is open government leading to more citizen participation in the public sector? *Information Polity*, 24(2), 185–203. <https://doi.org/10.3233/IP-190124>

- Roberts, J. (2009). No one is perfect: The limits of transparency and an ethic for 'intelligent accountability'. *Accounting, Organizations and Society*, 34(8), 957–970. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.005>
- Siddiquee, N. A. (2014). Public accountability in Malaysia: Challenges and critical concerns. *International Journal of Public Administration*, 37(8), 479–488. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.836659>
- Sintomer, Y., Herzberg, C., & Röcke, A. (2008). Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges. *International Journal of Urban and Regional Research*, 32(1), 164–178. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x>
- UNDP. (2022). *Transparency, accountability and participation: Catalysts for democratic governance*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org>
- van Helden, J., & Reichard, C. (2019). Making sense of performance in the public sector. *Financial Accountability & Management*, 35(3), 203–214. <https://doi.org/10.1111/faam.12188>
- Wampler, B. (2007). *Participatory budgeting in Brazil: Contestation, cooperation, and accountability*. Penn State Press.
- Wiratna, S. (2015). *Manajemen keuangan desa: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- World Bank. (2023). *Local governance for service delivery: Building accountable institutions*. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>